

RENCANA KERJA 2025



KATA PENGANTAR

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan baik perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance and Clean Government*).

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Palu, 17 Februari 2025

**Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. MOH. YASIN BACULU, S.Sos.,MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19701028 199203 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penyusunan	5
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM 2024	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM	12
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPSDM	13
2.4	Penelaahan Usulan Program Kegiatan	15
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BPSDM	31
3.3	Program dan Kegiatan	32
BAB IV	: PENUTUP	



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Selain itu, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Untuk mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja OPD adalah dokumen dengan wawasan waktu satu tahun yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsi guna mengoperasionalkan Renstra OPD untuk tahun rencana yang dimaksud dengan berpedoman pada hasil musrembang yang termuat dalam RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD. Rancangan Renja OPD dibuat sebagai bahan utama bagi musrembang daerah.



Adapun Renja OPD memiliki kedudukan dan fungsi yakni 1) sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD Provinsi dan RKA OPD Kabupaten/Kota dalam upaya penganggaran serta *chek and balances*, 2) sebagai rancangan awal Renja OPD menjadi masukan bagi pemutakhiran rancangan awal RKPD menjadi Rancang RKPD yang kelak digunakan sebagai sumber bahasan dalam musrembang RKPD. Substansi Renja OPD memuat kebijakan, program serta kegiatan pembangunan.

Untuk menjamin tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah, telah ditentukan indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahun yang realistis dengan pertimbangan sumberdaya yang tersedia. Untuk itu harus ditetapkan sasaran strategis yang harus dilaksanakan. Selain itu juga dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang hendak dicapai hingga tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Maju, Bersinergi, Berintegritas dan Profesional Melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Demi Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Profesional ASN melalui pengembangan kompetensi
	Terwujudnya ASN CORPORATE UNIVERSITY

Sebagai bentuk aktualisasi dari rencana strategis tersebut perlu disusun rencana kerja tahunan sebagai penjelasan lebih rinci dari perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran. Rencana kerja tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.



Berkenaan dengan itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 ini telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat sasaran-sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2025 dan jumlah anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut serta indikator-indikator keberhasilan program yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008m tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah



- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI n=Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah menjabarkan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.



Adapun tujuan secara khusus dari rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tahapan pembangunan 5 (lima) tahun yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026
2. Sebagai dokumen perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk jangka 1 (satu) tahun, yakni tahun 2025
3. Sebagai penegasan dari target indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2025
4. Adanya indikator keberhasilan pembangunan yang jelas dan terukur (akuntabel)
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-OPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra-OPD**
- 2.2 Analisi Kinerja Pelayanan OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5 Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan**

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**
- 3.3 Program dan**

Kegiatan BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional :

a. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

Pelatihan Kepemimpinan Administrator dilaksanakan dalam rangka mencapai prasyarat kompetensi manajerial apartur dengan jenjang jabatan struktural pejabat *Administrator*. Sumber anggaran pelaksanaan kegiatan diklat ini bersumber pada APBD murni BPSDM yang dikhususkan bagi aparatur Provinsi Sulawesi Tengah dan *Pos Berhadapan / Kontribusi Diklat* yang ditujukan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Target Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2024 sebanyak 4 Kelas atau 160 Orang Peserta dengan rincian 33 peserta dari Aparatur Pemprov Sulteng dan 127 Peserta Aparatur Kabupaten/Kota. Realisasi pada tahun tersebut 160 Peserta atau **100%** dari taget Rencana Kerja BPSDM Tahun 2024.

b. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan dalam rangka mencapai prasyarat kompetensi Manajerial apartur dengan jenjang jabatan struktural pejabat *Pengawas*. Sumber anggaran pelaksanaan kegiatan diklat ini bersumber pada APBD murni BPSDM yang dikhususkan bagi aparatur Provinsi Sulawesi Tengah dan *Pos Berhadapan / Kontribusi Diklat* yang ditujukan



bagi aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Target Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tahun 2024 sebanyak 2 Kelas atau 79 Orang Peserta dengan rincian 41 peserta dari Aparatur Pemprov Sulteng dan 38 Peserta Aparatur Kabupaten/Kota. Realisasi pada tahun tersebut 79 Peserta atau **98%** dari target Rencana Kerja BPSDM Tahun 2024.

Tabel 2.1
Kegiatan Diklat Manajerial

No.	Kegiatan Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
I.	Pelatihan Kepemimpinan (Sumber Dana APBD ProvSulteng)	210	303
a.	Administrator	160	160
b.	Pengawas	80	79

- a. Diklat Jabatan Fungsional
Pelatihan Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing – masing serta dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan. Diklat Fungsional yang dilaksanakan oleh Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah antara lain : Diklat Fungsional Profesi, baik pembentukan jabatan maupun peningkatan kompetensi pejabat fungsional, dan diklat fungsional kediklatan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi tenaga kediklatan. Pada Tahun 2024 BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional jabatan Perencana Provinsi Sulawesi Tengah dengan target sebanyak 31 peserta



dengan rincian peserta diikuti oleh ASN Provinsi Sulawesi tengah, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analisi Kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 30 Orang dengan rincian peserta diikuti oleh ASN Provinsi Sulawesi tengah dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 30 Orang dengan rincian peserta diikuti oleh ASN Provinsi Sulawesi tengah dan Pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2024 sebanyak 91 Orang. Realisasi kegiatan Diklat Fungsional, dengan output 91 alumni Diklat Fungsional atau **75%**, dari 91 target peserta yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Kegiatan Diklat Fungsional

No.	Kegiatan Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Perencanaan	40	31
2	Pendidikan dan Pelatihan Analisi Kebijakan	40	30
3	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional	40	30
	Jumlah	120	91



2. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis :

a. Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi

Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi adalah peningkatan kompetensi berkaitan dengan soft skill pemangku jabatan administrasi. Target Peserta diklat ini pada tahun 2024 adalah 120 peserta. Realisasi target adalah 120 peserta diklat atau 100%.

b. Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi berkaitan dengan urusan daerah fungsi penunjang (SETDA, SETWAN, BADAN) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Target Peserta diklat ini pada tahun 2024 adalah 280 orang peserta. Realisasi target adalah 261 peserta atau 93.21%, dari target 280 orang peserta.

c. Diklat Teknis Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi

Diklat Teknis Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi adalah Peningkatan Kompetensi Aparatur yang memiliki fokus terhadap kemampuan teknis jabatan administrasi dibidang urusan wajib dan pilihan Daerah. Target peserta diklat ini adalah 30 peserta diklat. Realisasi target adalah 30 peserta atau **100%**, dari target 30 peserta.



Tabel 2.3
Kegiatan Diklat Teknis

No.	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi	120	120
2.	Diklat Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	280	261
3.	Diklat Teknis Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	30	30
	TOTAL	430	411



3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

a. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri

Indikator dari kegiatan ini adalah Cakupan layanan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN di Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Jumlah Kerjasama Kediklatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah selalu berkerjasama dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan yaitu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perwakilan Kementerian/Lembaga di Sulawesi Tengah maupun Kementerian/Lembaga pengampu Diklat. Target kerjasama kedilatan pada tahun 2024 adalah 14 MoU dan realisasi target tersebut tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan telah berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, akan tetapi belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh penyelenggara diklat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami permasalahan dalam menentukan tingkat capaian kinerja pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dimana kegiatan yang diajukan setiap tahun anggaran tidak sama/berbeda sehingga sangat mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). hal ini terjadi karena diklat yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan aparatur dan masyarakat melalui analisis kebutuhan diklat (AKD) dan prioritas kediklatan.



2.3 Isu-ISu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDM

Secara berjenjang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Koordinasi yang dilakukan untuk mensinergikan antara program diklat dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan antara kegiatan diklat dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, LAN RI dan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dan BKPSDM Kabupaten/Kota.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel akan sulit meningkat apabila BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah selaku fasilitator yang seharusnya menjadi panutan tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri.

Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Pengembagnan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain :

- a. Kurangnya kompetensi/kemampuan dan tanggungjawab aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- b. Dukungan sarana terhadap penyelenggaraan kediklatan kurang memadai
- c. Sarana teknologi informasi belum terpenuhi
- d. Dukungan dana terhadap penyelenggaraan kediklatan kurang memadai

Dari permasalahan diatas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan isu-isu strategis yaitu :

- a. Sistem manajemen BPSDMD provinsi Sulawesi Tengah masih lemah sehingga mempengaruhi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya



- b. Lemahnya sistem manajemen penyelenggaraan kediklatan sehingga mempengaruhi perwujudan aparatur yang kompeten dan profesional
- c. Sistem informasi teknologi berbasis web pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah belum terwujud.

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.4

Analisis Faktor Eksternal untuk Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

No	PELUANG	TANTANGAN
1	Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur sesuai dengan bidang keahlian/job	Regulasi kepegawaian oleh Pemerintah Daerah
2	Mengembangkan pola kemitraan pada pihak ketiga dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana diklat	Akreditasi Program dapat dicabut oleh lembaga pembina bila lembaga/badan tidak dapat menunjukkan peningkatan dan perkembangan sesuai dengan yang dipersyaratkan
3	Mengembangkan pengelolaan diklat satu pintu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Komitmen dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif dalam upaya peningkatan dan pengembangan BPSDM
4	BPSDM satu-satunya lembaga penyelenggara diklat manajerial di Provinsi Sulawesi Tengah	Banyaknya Jenis Kompetensi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah berbanding dengan jumlah kompetensi tenaga pengajar (Widyaiswara) yang dimiliki BPSDM yang terbatas.

Berdasarkan analisa faktor peluang dan tantangan diatas, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :



- a. Menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Tengah yang terstandar
- b. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu layanan yang berstandar nasional
- c. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur internal BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah
- d. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kediklatan
- e. Menjalin konektivitas antar OPD dalam layanan Diklat satu pintu yang bermutu.

Implikasi terhadap isu-isu strategis ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun terencana.

2.4. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Program dan Kegiatan berusaha memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yaitu ***“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”***.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan usulan pemangku kepentingan yang diperoleh berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan rapat koordinasi skala prioritas diklat antara BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan BKPSDM Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan diklat bagi aparatur ini bertujuan untuk menciptakan aparatur yang berkarakter kuat, meningkatkan kompetensi aparatur, manajerial yang profesional, mudah mengadopsi teknologi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.



Tabel 2.6 dibawah ini merupakan usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, yang nantinya akan sangat mempengaruhi kelembagaan diklat pada proses penilaian akreditasi program dan lembaga.



Tabel 2.6
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA PROFESIONALITAS ASN MELALUI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		INDEKS PROFESIONALITAS ASN (NILAI DIMENSI KOMPETENSI)	25,87 Point		
	TERWUJUDNYA ASN CORPU PROVINSI SULAWESI TENGAH		PERSENTASE PEMENUHAN TERWUJUDNYA CORPORATE UNIVERSITY SULAWESI TENGAH	70 %		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai RB General	73 Point	16.985.074.501,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi	1 Laporan	703.439.100,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						



	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	581.010.050,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	71.346.150,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	51.082.900,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	1 Laporan	12.613.087.845,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	11.194.034.095,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi



				Tengah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.240.534.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	44.054.750,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	43.495.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	90.970.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	136.724.600,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	136.724.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Laporan	56.980.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	56.980.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Administrasi Umum	1 Laporan	595.061.001,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				



	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.235.751,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.990.250,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	469.435.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	1 Laporan	423.181.944,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				



	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	423.181.944,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan	1.500.586.828,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.109.119.672,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	391.467.156,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	956.013.183,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				



	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	383.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	178.420.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	394.093.183,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1) Presentase Kompetensi Teknis ASN Provinsi Sulawesi Tengah 2) Presentase Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan bagi ASN Provinsi Sulawesi Tengah 3) Presentase ASN Provinsi Sulawesi Tengah yang Bersertifikat Kompetensi 4) Presentase Pemenuhan	1) 15,25 % 2) 100 % 3) 1% 4) 100% 5) 100%	8.229.122.200,00	



	Akreditasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi			
	5) Presentase Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pengembangan Karir Kewenangan BPSDMD			
Pengembangan Kompetensi Teknis	1) Presentase ASN yang lulus Pelatihan Teknis Umum dan Pilihan Administrasi 2) Presentase ASN yang lulus Pelatihan Teknis Substantif dan Sosio Kultura	1) 2,48 % 2) 0,78 %	1.889.351.000,00	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2340 Orang	1.426.011.200,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				



		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	3 Dokumen	463.339.800,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase Kebijakan dan Rencana Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi yang diterbitkan 2) Jumlah ASN yang Mengikuti 3) Jumlah Program Pengembangan Kompetensi Fungsional 4) Persentase ASN hasil pelatihan barang jasa yang mengikuti sertifikasi 5) Persentase Kebijakan Implementasi ASN CorpU Sulawesi Tengah 6) Jumlah Dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100 % 2) 360 Orang 3) 3 Program 4) 80 % 5) 40 % 6) 1 Dokumen 7) 100 % 	6.339.771.200,00	



	Lembaga Sertifikasi 7) Persentase Prosedur Akreditasi yang diterapkan			
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				
	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	4 Dokumen	347.421.350,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				
	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	2 Dokumen	101.887.600,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				



	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	61 Orang	56.831.850,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				
	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan	512.136.950,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	2 Dokumen	98.525.700,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				
	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	76.746.850,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				



	<p>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>	<p>320 Orang</p>	<p>4.941.190.950,00</p>	<p>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</p>
<p>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>				



		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Dokumen	205.029.950,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
--	--	--	-----------	----------------	--



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kredibilitas kebijakan yang tinggi dan keandalan (reliability) pednaan akan menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan ecaa efisien dan efektif. Kementerian dan Lembaga pemerintah, dengan rasa memiliki (sense of ownership) yang tinggi terhadap kebijakan yang telah diambil karena keterlibatan mereka dalam proses formulasi, akan lebih cenderung melaksanakan anggaran sesuai rencana dan berkerja keras untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk mencapai hasil yang dimaksud, sistem penganggaran harus menciptakan lingkungan yang mendukung, dengan karakteristik mengkitkan perencanaan dan penganggaran dengan mengendalikan pengambilan keputusan, memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetesi satu sama lain, meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian kembali prioritas alokasi sumber daya.

Lingkungan yang mendukung semacam ini memungkinkan sistem penganggaran untuk memfasilitasi review kebijakan dan program, sejalan dengan prioritas-prioritas yang mengalami perubahan, yang pada gilirannya mencerminkan tekanan dari berbagai sumber, yang utama berasal dari perkembangan politik, fluktuasi ketersediaan sumber daya dan informasi baru mengenai efisiensi dan efektivitas program yang didukung oleh anggaran.

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama pada pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berkenaan dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, salah satunya tentang pembaharuan sistem diklat aparatur, yang disebut dengan reformasi kebijakan diklat. Reformasi kebijakan diklat seperti pemberdayaan lembaga diklat di daerah, kebijakan penyelenggaraan diklat, mengelola diklat, dan



jenjang diklat. Kesemua pembaharuan ini akan sangat mempengaruhi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui program-program prioritasnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih kekurangan staf teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu, belum optimalnya pelaksanaan diklat penjenjangan dasar maupun penjenjangan tingkat lanjutan, koordinasi antara diklat penjenjangan dasar maupun penjenjangan lanjutan belum optimal, kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan rencana kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah

Bertolak dari penelaahan kebijakan nasional tentang reformasi kediklatan dan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kebijakan dan program prioritas untuk mencapai misinya, yaitu :

- a. Mewujudkan diklat satu pintu yang profesional dan bersinergi dengan pemangku kepentingan
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana kediklatan
- c. Mengembangkan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan
- d. Mengembangkan kompetensi Widyaiswara.

3.2.1. Tujuan dari Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governence*) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3.2.2. Sasaran dari Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kualitatif, oleh karena itu sasaran harus menggambarkan hal yang ingin



dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran dari misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran berbasis informasi teknologi;
2. Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
5. Terwujudnya sistem pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
6. Terwujudnya sistem pengembangan kompetensi teknis
7. Terwujudnya organisasi yang profesional dan akuntabel berbasis kinerja, dengan pembinaan kelembagaan yang terstandar dan terakreditasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mengacu pada pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Capaian kinerja yang akan dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran program dan kegiatan oleh BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional.

Adapun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 7 (tujuh) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan terkonsentrasi di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dana



atau pagu anggaran indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp16.985.074.501,00	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp703.439.100,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12.613.087.845,00	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp136.724.600,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp56.980.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp595.061.001,00	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp423.181.944,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.500.586.828,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp956.013.183,00	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp8.229.122.200,00	APBD
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp1.889.351.000,00	APBD
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp6.339.771.200,00	APBD
	Jumlah		Rp25.214.196.701,00



Pada tahun 2025 dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan :
 - a) Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
 - b) Ujian Pengadaan Barang Dan Jasa
 - c) Peningkatan Kapasitas Widyaiswara
 - d) Kerjasama Program Pengembangan Kompetensi
 - e) Terintegrasinya Sistem Pembelajaran ASN Corpu
 - f) Terbentuknya Forum Pembelajaran ASN Corpu

- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
 - a) Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekolah
 - b) Pelatihan Properti Dasar
 - c) Pelatihan Barang dan Jasa Level 1
 - d) Pelatihan Barang dan Jasa Level 2 Tipe C
 - e) Pelatihan Barang dan Jasa Okupasi lanjutan
 - f) Pelatihan Integritas ASN
 - g) Pelatihan Barang dan Jasa Okupasi Pejabat Pengadaan.
 - h) Podcast MERDEKA BANGKOM

- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - a) Pengiriman Peserta PKN II
 - b) Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 - c) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
 - d) Orientasi PPPK
 - e) Pelatihan bagi Jabatan Fungsional
 - f) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)



Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025
	Kegiatan	Sasaran	Output Kegiatan	Target Waktu		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					Presentase Kompetensi Teknis ASN Provinsi Sulawesi Tengah	15,25 %
					Presentase Kompetensi Manajerial Dan Pemerintahan Bagi ASN Provinsi Sulawesi Tengah	100 %
					Presentase ASN Provinsi Sulawesi Tengah Yang Bersertifikat Kompetensi	1%
					Presentase Pemenuhan Akreditasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	100%
					Presentase Nilai Sistem Merit Pada Sub Aspek Pengembangan Karir Kewenangan BPSDMD	100%
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis					Presentase ASN Yang Lulus Pelatihan Teknis Umum Dan Pilihan Administrasi	2,48 %
					Presentase ASN Yang Lulus Pelatihan Teknis Substantif Dan Sosio Kultura	0,78 %
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Tehnis Umum, Inti Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Pelatihan Penatausahaan Keuangan Khusus Bendahara Sekolah	Bendahara Dan Pembantu Bendahara Sekolah	80 Alumni	Triwulan I 2025	Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan	280 Peserta



Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	Pelatihan Integritas Sebagai Kompetensi Manajerial	Pejabat Manajerial	200 Alumni	Triwulan II - III 2025		
	Pelatihan Barang, Jasa Pemerintah Level Dasar	Pejabat Pengadaan, Ppk, Pptk	90 Alumni	Triwulan II 2025	Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Teknis Administrasi Penunjang	230 Peserta
	Pelatihan Barang, Jasa Ppk Tipe C	Pejabat Ppk Dan Pptk	30 Alumni	Triwulan II 2025		
	Pelatihan Barang, Jasa Okupasi Lanjutan	Pejabat Pengadaan	30 Alumni	Triwulan II 2025		
	Pelatihan Government Talent Academy	Pejabat Pelaksana	40 Alumni	Triwulan III 2025		
	Pelatihan Properti Dasar	Pejabat Bmd	40 Alumni	Triwulan III 2025		
	Podcast Merdeka Bangkom	Seluruh Asn	1730 Alumni	Triwulan I - IV 2025	Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	1730 Peserta
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti Dan Pilihan Bagi Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, PD Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Triwulan I - IV 2025	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Kajian Hasil Penerapan Pengembangan Kompetensi Teknis Provinsi Sulawesi Tengah	12 Laporan
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan Tindak Lanjut Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Bulan Desember 2025	Laporan tindak lanjut penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis	12 Laporan
	Penyusunan Media Sosial Sebagai Diseminasi Dan Publikasi Pelatihan Teknis	Jumlah Medsos	Media Sosial Publikasi	Triwulan I - IV 2025	Jumlah media sosial sebagai media publikasi	1 Media Sosial
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional					Persentase Kebijakan dan Rencana Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi yang diterbitkan	100 %
					Jumlah ASN yang Mengikuti	360 Orang
					Jumlah Program Pengembangan Kompetensi Fungsional	3 Program



					Persentase ASN hasil pelatihan barang jasa yang mengikuti sertifikasi	80 %
					Persentase Kebijakan Implementasi ASN CorpU Sulawesi Tengah	40 %
					Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen
					Persentase Prosedur Akreditasi yang diterapkan	100 %
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	Integrasisistem Pembelajaran Copru	Sistem Pembelajaran Copru	Sistem Pembelajaran Copru Yang Terintegrasi	Triwulan I - IV 2025	Jumlah Sistem pembelajaran Copru yang terintegrasi	1 Sistem Pembelajaran
	Pembentukan Forum Pembelajaran Copru	Forum Pembelajaran	Forum Pembelajaran Copru Yang Terbentuk	Triwulan I - IV 2025	Jumlah pembelajaran copru yang terbentuk	4 Forum Pembelajaran
	Penjaminan Mutu Kompetensi Manajerial	Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial	Pengembangan Kompetensi Manajerial Yang Terstandarisasi	Triwulan I - IV 2025	Jumlah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang terstandarisasi	5 Pelatihan
	Penjaminan Mutu Kompetensi Teknis	Mutu Pengembangan Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis Yang Terstandarisasi	Triwulan I - IV 2025	Jumlah pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis yang terstandarisasi	3 Pelatihan
Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Koordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi Di Intasi Pembina Sertifikasi Profesi	Lembaga Sertifikasi Profesi	Koordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi	Triwulan I - IV 2025	Jumlah koordinasi yang terlaksana	1 Koordinasi
	Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi	Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi	Sertifikasi Kompetensi	Triwulan I - IV 2025	Jumlah laporan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi	1 Laporan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Kompetensi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Level 1	Uji Kompetensi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Level 1	51 Peserta	Triwulan I - Iv 2025	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1	51 Peserta
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Dan Sumber Belajar	Dokumen Evidance Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi	Akreditas Lembaga Pengembangan Kompetensi	Dokumen Evidance Akreditasi Lembaga	Triwulan IV 2025	Jumlah dokumen evidance akreditasi lembaga	1 Dokumen
	Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pelatihan Kepemimpinan	Nilai Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan	Triwulan I - III 2025	Jumlah program pelatihan kepemimpinan BPSDMD	2 Pelatihan Kepemimpinan



	Orasi Ilmiah Widyaiswara BPSDMD Sulawesi Tengah	Orasi Ilmiah Widyaiswara	Widyaiswara Yang Mengikuti Orasi Ilmiah	Triwulan I - IV 2025	Jumlah widyaiswara yang telah mengikuti orasi ilmiah	1 Widyaiswara
	Pelatihan Widyaiswara Dalam Pelatihan Tenaga Pelatih Bidang Kompetensi Teknis	Training Of Fasilitator	Widyaiswara Yang Mengikuti Training Of Fasilitator	Triwulan I - IV 2025	Jumlah widyaiswara BPSDMD yang mengikuti Training of fasilitator	10 Widyaiswara
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Kesepakatan Bersama Dan Kerjasama Pengembangan Kompetensi Antar Lembaga Dan Instansi	Kerja Sama Pelatihan Dan Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama Dan MOU	Triwulan I 2025	Jumlah kerja sama yang terjalin	13 Kerja Sama Dan MOU
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Dan Jabatan Fungsional	Standarisasinya Konten Pembelajaran Digital	Konten Pembelajaran Digital	Konten Pembelajaran Digital Yang Terstandarisasi	Triwulan I - IV 2025	Jumlah pembelajaran digital yang terstandarisasi	4 Konten Pembelajaran Digital
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Dan Prajabatan	Pelatihan Pejabat Pimpinan Tinggi Melalui Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dan Madya	9 Alumin	Triwulan I - IV 2025	Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang mengikuti pelatihan kompetensi kepemimpinan	9 Jpt
	Pelatihan Pejabat Administrator Melalui Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	Pejabat Administrator	36 Alumin	Triwulan I - IV 2025	Jumlah jabatan Administrator yang mengikuti pelatihan kompetensi kepemimpinan	36 Pejabat
	Pelatihan Pejabat Pengawas Melalui Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	Pejabat Pengawas	10 Alumin	Triwulan I - IV 2025	Jumlah jabatan Pengawas yang mengikuti pelatihan kompetensi kepemimpinan	10 Pejabat
	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Calon Pegawai Negeri Sipil	440 Alumni	Triwulan I - IV 2025	Jumlah CPNS yang mengikut Kompetensi Dasar	440 Peserta
	Orientasi PPPK	PPPK	480 Alumni	Triwulan I - IV 2025	Jumlah PPK yang mengikut orientasi	480 Peserta
	Pelatihan Pejabat Fungsional	Pejabat Fungsional	40 Alumni	Triwulan I - IV 2025	Jumlah Pejabat Fungsional yang Pelatihan	40 Peserta
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan Dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, Dan Kerja Sama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, Dan Prajabatan	Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Triwulan I - IV 2025	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Kajian Hasil Penerapan Pengembangan Kompetensi Manajerial Provinsi Sulawesi Tengah	30 Laporan



	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Kompetensi Manajerial	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Laporan Tindak Lanjut Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Bulan Desember 2025	Laporan rencana tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan kompetensi Manajerial	30 Laporan
--	---	---	--	---------------------	--	------------



BAB IV

PENUTUP

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 melaksanakan 1 Program dan 19 Kegiatan. Kaidah-kaidah yang menjadi perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan oleh BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah antara lain, ketersediaan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur dan peraturan-peraturan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan kediklatan.

Rencana tindak lanjut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur dan memenuhi standar akreditasi lembaga diklat antara lain :

1. Mengupayakan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tersedianya prosentase anggaran yang lebih proporsional yang mendukung terwujudnya re-akreditasi BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah
2. Mengikutsertakan Widyaiswara untuk meningkatkan kompetensi di bidang diklat teknis, fungsional maupun diklat lainnya
3. Mengupayakan ketersediaan anggaran uantuk menambah dan memperbaiki sarana dan prasaran penunjang kediklatan, dan
4. Melakukan perbaikan sistem managemen organisasi dan informasi sesuai dengan perkembangna saat ini.

Palu, 17 Februari 2025

**Pt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. MOH. YASIN BACULU, S.Sos.,MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19701028 199203 1 005